



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

## Kickoff Meeting: Penguatan Tata Kelola SPBE Lanjut di Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat

Daring, 27 Maret 2024

Kerjasama Center for Digital Society  
Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat





UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

# PENGANTAR: Reviu Pekerjaan 2023

Daring, 27 Maret 2024

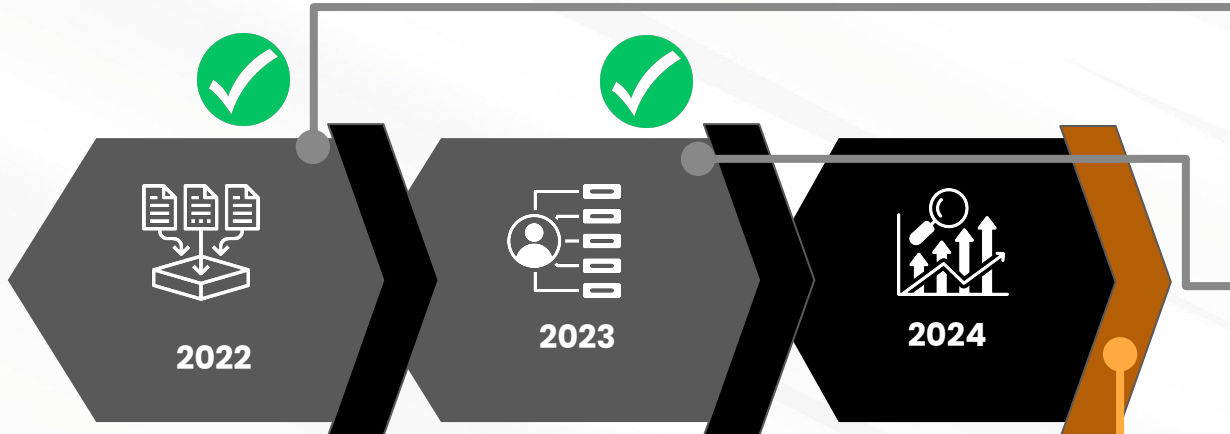
Kerjasama Center for Digital Society  
Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat





# PERJALANAN MOU CFDS UGM-Pemprov Sulbar

## Dalam Penyelenggaraan SPBE



- 1. Untuk Pemenuhan **Indikator 11 dan 12** (PermenpanRB 59, 2020)
- 2. Pondasi **Keterpaduan** dan **Keberlanjutan TIK**
- 3. Bagian dari agenda **Reformasi Birokrasi**

T

- 1. **Menjaga** tingkat kematangan **indeks SPBE** dan peningkatan bertahap
- 2. Memastikan **Tata Kelola** dan **Manajemen TIK terpadu** dan **berkelanjutan** (

T

- 1. **Menjaga** tingkat kematangan **indeks SPBE**
- 2. Memastikan **Tata Kelola** dan **Manajemen TIK terpadu** dan **berkelanjutan**
- 3. **Integrasi Layanan** Tematik bertahap menuju **data driven government**

T

- 1. Penyusunan Arsitektur (6 domain) dan Peta Rencana (7 Muatan) V1.0 (Done)
- 2. Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (Done)

- 1. Reviu Penajaman Arsitektur dan Peta Rencana (v2.0)
- 2. Penyusunan Dokumen Tata Kelola
- 3. Pendampingan audit infrastruktur dan audit aplikasi
- 4. Menyusun dan Memandu pedoman Manajemen Data dan Risiko

- 1. Reviu Penajaman Arsitektur dan Peta Rencana (v3.0)
- 2. Mendampingi Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen dan Pengembangan Integrasi Layanan
- 3. Menyusun dan Memandu pedoman Manajemen TIK lainnya

# Potret Terkini SPBE Pemprov Sulawesi Barat

Rerata Nilai

Indeks SPBE

2.41

Domain Kebijakan

2

Domain Tata Kelola

1.97

Domain Manajemen

1.15

Domain Layanan

3.22

Nilai  
Tertinggi

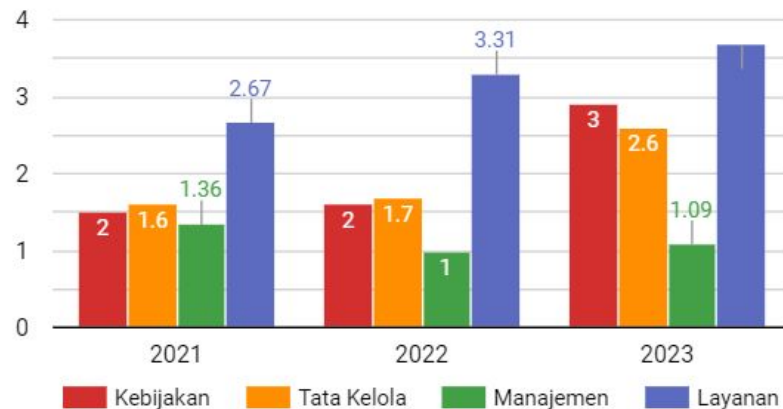
Indeks SPBE

2.89

Nama Instansi	Tahun	Indeks SPBE
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2023	2.89
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2022	2.31
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2021	2.03

Nama Instansi	Provinsi	Domain Kebijakan	Domain Tata Kelola	Domain Manajemen	Domain Layanan	Tahun	Predikat	Indeks SPBE
1. Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	5	3	3.82	4.01	2023	Sangat Baik	3.86
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2.9	2.6	1.09	3.69	2023	Baik	2.89
3. Pemerintah Kab. Majene	Sulawesi Barat	4.9	1.4	1.09	3.05	2023	Cukup	2.56
4. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	2.9	1.1	1.27	2.93	2023	Cukup	2.19
5. Pemerintah Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1.2	1.4	1	3.24	2023	Cukup	2.15
6. Pemerintah Kab. Pasangkayu	Sulawesi Barat	1.1	1.1	1	2.56	2023	Kurang	1.75
7. Pemerintah Kab. Mamasa	Sulawesi Barat	2.1	1	1	1.2	2023	Kurang	1.23

## Domain Evaluasi SPBE



# Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2022	Buku Arsitektur dan Peta Rencana SPBE v1.0	Mencakup Studi Literatur, Survey, Analisa Kondisi Eksisting, Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE as is (versi 1.0)	Indikator 11 Indikator 12
2022	Dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Mencakup aktivitas mendesain, verifikasi, update dan analisa visualisasi informasi	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12



# Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2022

<https://spbe.sulbarprov.go.id/Dashboardv3.0.html>



## Arsitektur Peta Rencana v3.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Terkini bisa [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa



## Arsitektur Peta Rencana v2.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa



## Arsitektur Peta Rencana v1.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa



- Domain Layanan
- Domain Proses Bisnis
- Domain Data
- Domain Aplikasi
- Peta Rencana

**Arsitektur SPBE | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

### Arsitektur Layanan

Nama Layanan  Enter a value

OPD

Lembaga Dependensi

RAL Level-1

RAL Level 2 (Dependency)

**Jumlah Layanan**  
1,274  
Layanan Tertarik Lembaga Lain  
919  
Instansi  
42

Referensi Arsitektur Level-1		Referensi Arsitektur Level-2	
RA	RAI	RAI	RAI
RA 01.01.01	RAI 01.01.01	RAI 01.01.01	RAI 01.01.01
RA 01.01.02	RAI 01.01.02	RAI 01.01.02	RAI 01.01.02
RA 01.01.03	RAI 01.01.03	RAI 01.01.03	RAI 01.01.03
RA 01.01.04	RAI 01.01.04	RAI 01.01.04	RAI 01.01.04
RA 01.01.05	RAI 01.01.05	RAI 01.01.05	RAI 01.01.05
RA 01.01.06	RAI 01.01.06	RAI 01.01.06	RAI 01.01.06
RA 01.01.07	RAI 01.01.07	RAI 01.01.07	RAI 01.01.07
RA 01.01.08	RAI 01.01.08	RAI 01.01.08	RAI 01.01.08
RA 01.01.09	RAI 01.01.09	RAI 01.01.09	RAI 01.01.09
RA 01.01.10	RAI 01.01.10	RAI 01.01.10	RAI 01.01.10

**Referensi Domain Data**

**Jumlah Data**  
527

**Jumlah OPD**  
42

Referensi Arsitektur Level-1		Referensi Arsitektur Level-2	
RA	RAI	RAI	RAI
RA 06	RAI 06	RAI 06.01	RAI 06.01.01
RA 04	RAI 04	RAI 04.01	RAI 04.01.01
RA 07	RAI 07	RAI 07.01	RAI 07.01.01
RA 02	RAI 02	RAI 02.01	RAI 02.01.01
RA 10	RAI 10	RAI 10.01	RAI 10.01.01
RA 01	RAI 01	RAI 01.01	RAI 01.01.01
RA 09	RAI 09	RAI 09.01	RAI 09.01.01
RA 03	RAI 03	RAI 03.01	RAI 03.01.01
RA 05	RAI 05	RAI 05.01	RAI 05.01.01
RA 08	RAI 08	RAI 08.01	RAI 08.01.01

**Statistik Domain Data**

Data Berdasarkan Sifatnya

Data Berdasarkan Validasinya

Data per OPD

Perangkat Daerah	Jumlah Data...
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122
2. Dinas Kesehatan	86
3. Dinas Sosial	24
4. Dinas Lingkungan Hidup	19
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada...	19
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pemada...	19
7. Dinas Kelautan dan Perikanan	14
8. Dinas Kearsifan, Pelestarian dan Statistk	14
9. Dinas Perindustrian dan Kerajinan	14

**Detail Metadata Data**

Nama Data	Unsur Data	RAL Lvl-1	RAL Lvl-2	Jenis Data	Validasi Data	OPD
1. Data RA	Jumlah seluruh menges...	RA 06	RAI 06.01	Data Pendidikan	Publik	Dinas Pendidikan dan Kab...
2. Data Penunjang Pememo...	Data Tertarik Sure Pememo...	RA 09	RAI 09.07	Data Kekek...	Publik	Tahunan

**Referensi Domain Aplikasi**

**Jumlah Aplikasi**  
201

**Jumlah OPD Pemilik Aplikasi**  
33

Referensi Arsitektur Level-1		Referensi Arsitektur Level-2	
RAA	RAAI	RAAI	RAAI
RAA 01	RAAI 01	RAAI 01.01	RAAI 01.01.01
RAA 02	RAAI 02	RAAI 02.01	RAAI 02.01.01

**Statistik Domain Aplikasi**

Aplikasi Berdasarkan Engine Database

Aplikasi Berdasarkan Bahasa Pemrograman

Aplikasi per OPD

Perangkat Daerah	Jumlah
1. Dinas Lingkungan	25
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21
3. Rumah Sakit Umum Regional Daerah	19
4. Dinas Kesehatan	17
5. Dinas Transmigrasi	13
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keb...	11
7. Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil	10
8. Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10
9. Dinas Tenaga Kerja	10

**Detail Metadata Aplikasi**

Nama Aplikasi	Unsur Aplikasi	Fungsi Aplikasi	RAA Lvl-1	RAA Lvl-2	OPD
1. e-KEMERIA	mempunyai kinerja ASN	Mempermudah memajukan line...	RAA 01: Aplikasi Umum	RAA 01.02: Aplikasi Administrasi	Dinas Transmigrasi
2. Satu Data KHP	Validasi data hasil usaha petak...	Mempermudah validasi data ha...	RAA 01: Aplikasi Umum	RAA 01.01: Aplikasi Layanan P...	Dinas Kelautan dan Perikanan

# Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2023	Reviu Arsitektur dan Peta Rencana v2.0	Mereview kelengkapan, validitas, dan kesesuaian arsitektur serta peta rencana dengan melakukan update pada dashboard Peta Rencana	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12
2023	Buku Saku Tata Kelola TIK	Mencakup Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung 4 indikator tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterpaduan Rencana dan anggaran,</li><li>2. Pembangunan Aplikasi SPBE,</li><li>3. Layanan Pusat Data</li><li>4. Sistem Penghubung Layanan</li></ol> Masing-masing indikator dicetak menjadi satu buku saku.	Indikator 13 Indikator 15 Indikator 16 Indikator 18
2023	Persiapan dan Pendampingan Audit Tools BRIN	Mencakup persiapan pemanfaatan Audit Tools BRIN dan pendampingan agenda audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Persiapan Pemenuhan Indikator 29 & Indikator 30
2023	Pedoman Manajemen Resiko SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 21
2023	Pedoman Manajemen Data SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 23



# Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

SPBE

DASHBOARD KEBIJAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN LAYANAN TOOLS

**Pemerintah  
Provinsi  
Sulawesi  
Barat**

Menerapkan SPBE yang merupakan platform kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

<https://spbe.sulbarprov.go.id/>



SPBE

DASHBOARD KEBIJAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN LAYANAN TOOLS

## Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.



Keterpaduan Rencana Anggaran SPBE



Pembangunan Aplikasi SPBE

pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

[LINK SOP](#)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**INFORMASI**

Tanggal Pembuatan SOP: \_\_\_\_\_  
 Tanggal Revisi: \_\_\_\_\_  
 Tanggal Ditetapkan: \_\_\_\_\_  
 Disahkan Oleh: \_\_\_\_\_  
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Moderator: A. Sidiq, M.A.C.  
 NIP: 19600421991010001

Nama SOP: \_\_\_\_\_  
 Tujuan Aplikasi: untuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

**DAFTAR ISI**

1. Maksud dan Tujuan  
2. Ruang Lingkup  
3. Sasaran  
4. Maksud dan Tujuan  
5. Maksud dan Tujuan

No	Uraian Kegiatan	Peta Jalan										Kategori	Waktu	Output	Keterangan				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	1. SOP Pembinaan Sistem Penghubung Layanan																		
2	Mengakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	1															1 jam kerja	Sifat Perawatan	
3	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	2																1 jam kerja	Disposisi Perencanaan
4	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	3																1 hari kerja	Beritas Perencanaan
5	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	4																1 jam kerja	Beritas Perencanaan
6	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	5																3 jam kerja	Beritas Perencanaan
7	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	6																2 hari kerja	Sifat Perawatan
8	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	7																1 jam kerja	Sifat Perawatan
9	Melakukan pemeliharaan integritas Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan	8																2 hari kerja	Layanan Hasil Perencanaan

### TOOLS EVALUASI MANDIRI SPBE

Pedoman Menteri PANRB No. 6, 2023

Logo: SPBE, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, CfdS CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

Pencarian Data:  Berubah

Domain:  Aspek:  UIO/PIC:

Indikator	Nama Indikator	Nilai
Indikator 1	Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah ...	5
Indikator 2	Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah ...	5
Indikator 3	Kebijakan internal manajemen data	4
Indikator 4	Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	4
Indikator 5	Kebijakan internal layanan Pusat Data	2
Indikator 6	Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerinta...	2
Indikator 7	Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi...	1
Indikator 8	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1

Klik pada grafik dan label untuk mendapatkan panduan kematangan yang diinginkan





# Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023



GUBERNUR SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 188.4/7/SULBAR/I/2023  
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala



GUBERNUR SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 188.4/7/SULBAR/I/2023  
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

NOMOR: ....

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT DATA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi dan pemenuhan maturitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait penyelenggaraan layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah **Provinsi Sulawesi Barat**.
- b. bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika **Provinsi Sulawesi Barat** tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah **Provinsi**



Draft SK Tata Kelola

# Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2024	Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE v 3.0	Mencakup penyusunan regulasi pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12
2024	Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Aset TIK Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 24
2024	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	Mencakup penyusunan regulasi pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 25
2024	Manajemen Pengetahuan SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 26
2024	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Layanan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 28

*Keterangan: bisa ke depan dilanjutkan Manajemen Perubahan (indikator 27) dan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22) karena belum terlalu jelas rujukannya*



1. Meningkatkan kolaborasi tata kelola dan manajemen / audit bersama OPD terkait
2. Untuk lampiran bukti dukung sebaiknya label dikode sesuai dengan indikator, misal:  
[Indikator38\\_NamaBuktiDukung \(Nama Bukti Dukung yang singkat informatif\).pdf](#)
3. Dalam menarasikan sebaiknya [sesuai dengan kaidah penjelasan dan skeleton yang ada di ketentuan pedoman Menpanrb nomor 6 tahun 2023](#) (untuk kedepannya perlu disesuaikan).
4. Diperlukan pembuktian kapabilitas di [level-level kematangan \(2,3,4\)](#) yang dilalui dengan [pointer yang baku dan komprehensif](#).



# Cara Menarasikan Bukti Dukung

Pengungkapan FAKTA sebaiknya untuk setiap penjelasan bukti dukung memuat apa bukti dukung tersebut (tentang apa) ada di pasal atau halaman mana dan merujuk pada file mana. (agar polanya sama): **Penetapan apa, tentang apa, dimana (pointer pasal dan atau halaman)** dan **file mana**.

## MISAL: Indikator 3 - Level-3

Kebijakan terkait Manajemen Data tercantum dan telah **ditetapkan pada Perda No 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE pada Pasal 16 dan 34** sesuai data dukung **3.a-PERDA-No-16-Tahun-2018.pdf** dan **Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE di Kabupaten Karawang yang memuat pengaturan proses Manajemen Data** pada **Lampiran Halaman 6 & 7 Huruf I angka 1 s/d 6**, sesuai data dukung **3.b-KepBup-No-308-Tahun-2022.pdf** (FAKTA)

Pengaturan pada kebijakan tersebut telah memuat **seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data**. (ANALISIS)



# TOOLS EVALUASI MANDIRI SPBE

Pedoman Menteri PANRB No. 6, 2023



Pilih Indikator >>  
Tentukan Level  
Kematangan yang  
dikehendaki

Pencarian Data Berubah Domain

Indikator	Nama Indikator	Tingkat
Indikator 1	Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Dae...	5
Indikator 2	Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah ...	4
Indikator 3	Kebijakan internal manajemen data	4
Indikator 4	Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	3
Indikator 5	Kebijakan internal layanan Pusat Data	2
Indikator 6	Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerinta...	2
Indikator 7	Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Insta...	1
Indikator 8	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1



Klik pada grafik dan label untuk mendapatkan panduan kematangan yang diinginkan

PERSYARATAN

Indikator	Nama Indikator	Kriteria dan Kondisi	Standar
Indikator 1	Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Sudah ada pengaturan Arsitektur SPBE yang sudah ditetapkan, tetapi belum mencakup 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE secara keseluruhan.	Narasi penyus kriteria Jika d maka l

PERSYARATAN

Indikator	Nama Indikator	Kriteria dan Kondisi	Standar Penilaian	Tingkat
Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Memenuhi TK. 3 serta terdapat kolaborasi dengan layanan lain	Adanya fungsi yang menggantikan berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan lainnya yang bersifat seamless/otomatis	4

Tingkat Kematangan yang ingin dicapai

Tingkat	Bukti Dukung	Contoh	Keterangan
4	Dokumentasi (screenshot, video, dsb) yang menggambarkan integrasi (basis data/API /Middleware / layanan)	1. Screenshot API, log integrasi 2. Penggunaan aplikasi layanan pengadaan barang dan jasa SPBE	1. Jika IPPD melampirkan bukti dukungan penggunaan aplikasi lain yang dibangun sendiri atau aplikasi sejenis lainnya, maka harus menunjukkan bukti dukungan secara berpijari dari mulai fungsi diseminasi, interaksi, transaksi, dan kolaborasi (level 1-4)

Tingkat	Perubahan Kriteria (*sesuai indikator)	UIC	IC	Mitra
4	Kriteria Bukti Dukung: 1. Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/revisi terkait "Layanan Pengadaan Barang, Jasa" yang dilakukan secara berkesinambungan; 2. Hasil evaluasi/revisi yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual, dan 3. Bukti undangan rapat evaluasi "Layanan Pengadaan Barang Jasa", dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi "Layanan Pengadaan Barang Jasa" (opsional).	Unit UKP	Layanan Pengadaan / UJ/BLP / Biro Umum	Seluruh OPD/Unit Kerja/Satker

Perubahan-perubahan yang pada setiap indikator



<https://s.id/1Mw6N>

Pedoman MENPANRB 6 Tahun 2023



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

# Paparan Pendahuluan: Penguatan Tata Kelola SPBE Lanjut di Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat

Daring, 27 Maret 2024

Kerjasama Center for Digital Society  
Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat





# KOMPOSISI TIM DAN TA

## Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom

Koordinator **Evaluator SPBE** UGM (KemenPANRB) - UGM (2018-skrng)

**Peneliti Smart City & SPBE**, CFDS - Fisipol UGM (2018-sekarang)

Tim Koordinasi **Jogja Smart Province DIY (2018-sekarang)**

**IT Konsultan** (unit usaha UGM) sejak (2004 - sekarang)

CFDS Focus Area:

1. Digital Governance, including:
  1. Social Media and Politics
  2. E-democracy/digital democracy
  3. digital literacy for government
  4. eGovernment (SPBE)
2. Digital Economy, including
  1. Small and Medium Enterprises (SMEs) go online
  2. Financial Technology
  3. Development of e-commerce
3. Future Technology
  1. Artificial Intelligence
  2. Cloud Computing
  3. Data Analytics



**Konsultan, Praktisi dan Assesor SDM di Pemerintahan**



**Konsultan SPBE dan Asesor Smart City di Pemerintahan**



# Kerangka Acuan Kerja

## Lingkup Kegiatan

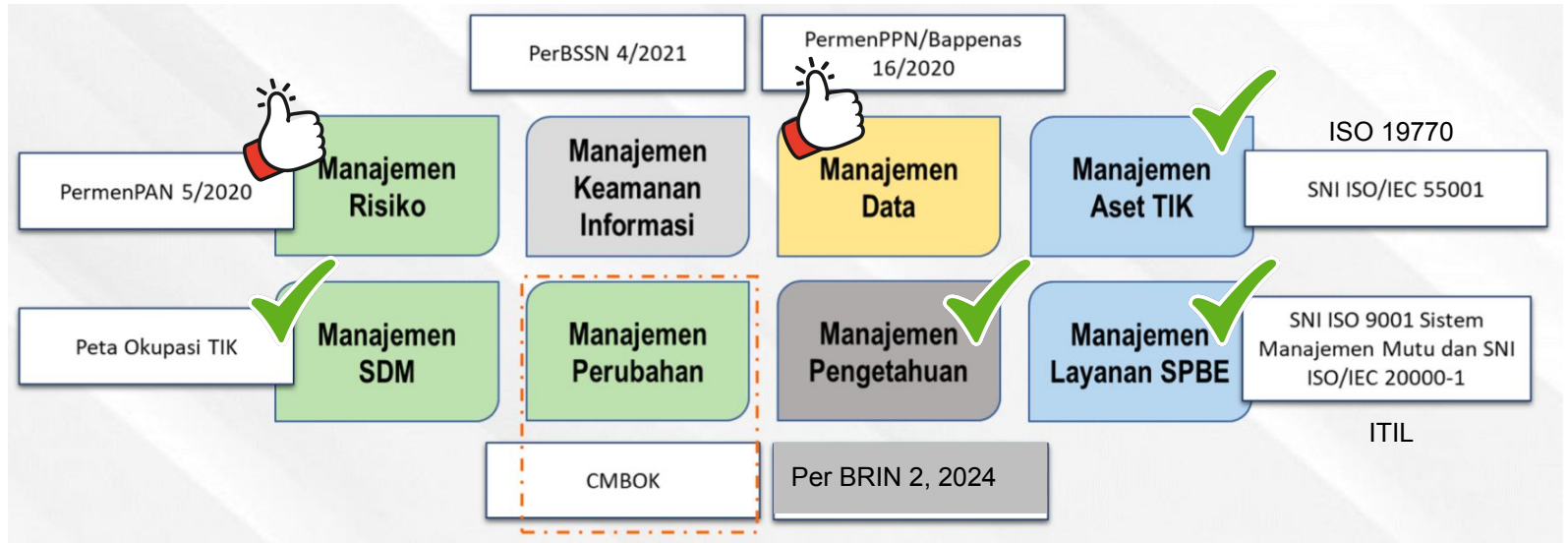


1. **Perumusan cakupan** Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
2. **Pemetaan kondisi terkini** penyelenggaraan manajemen di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3. **Verifikasi data dan informasi eksisting** pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
4. **Analisis kebutuhan** proses Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE yang masuk dalam cakupan SPBE sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku (perpres 95,2018)
5. **Penyusunan pedoman** Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.







# Manajemen SPBE



Perpres 95, 2018 | Pasal 46

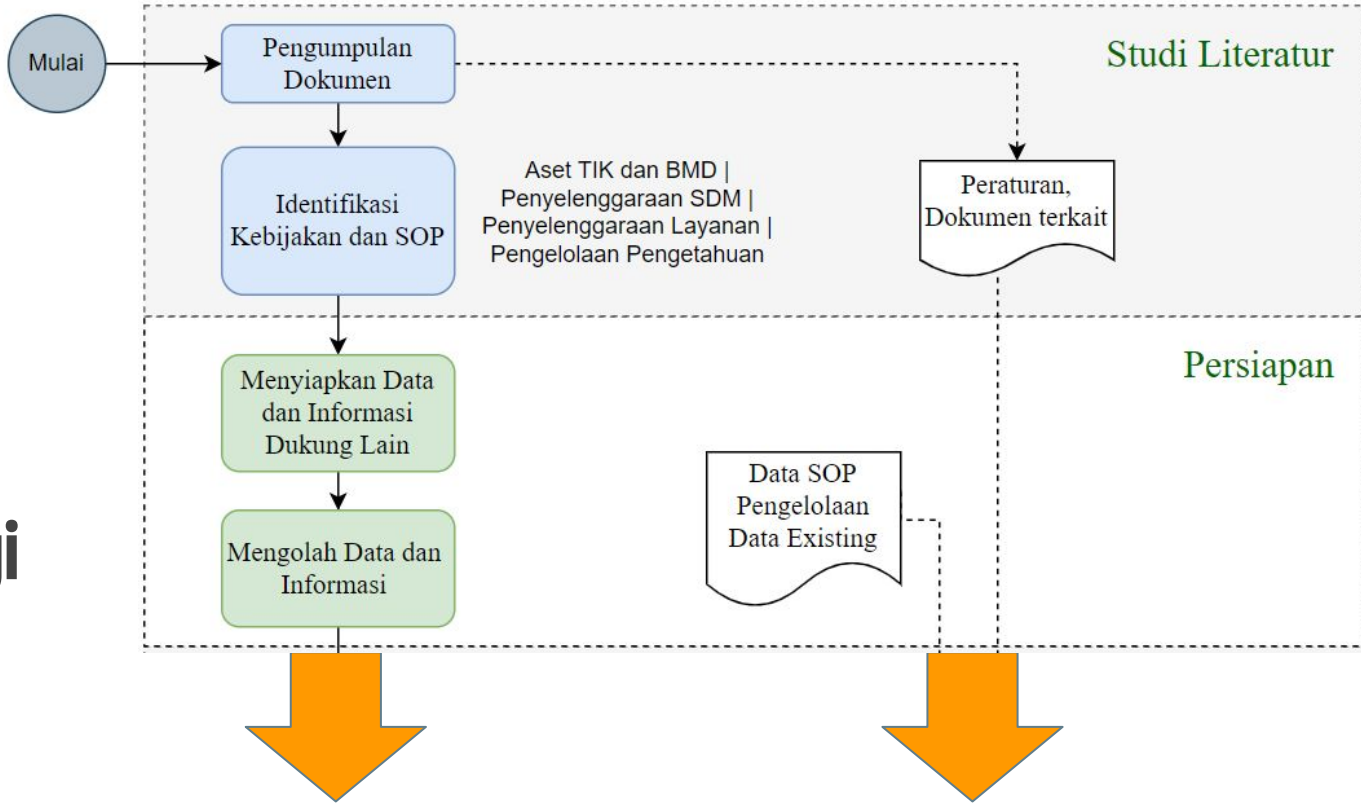


 Sudah disusun

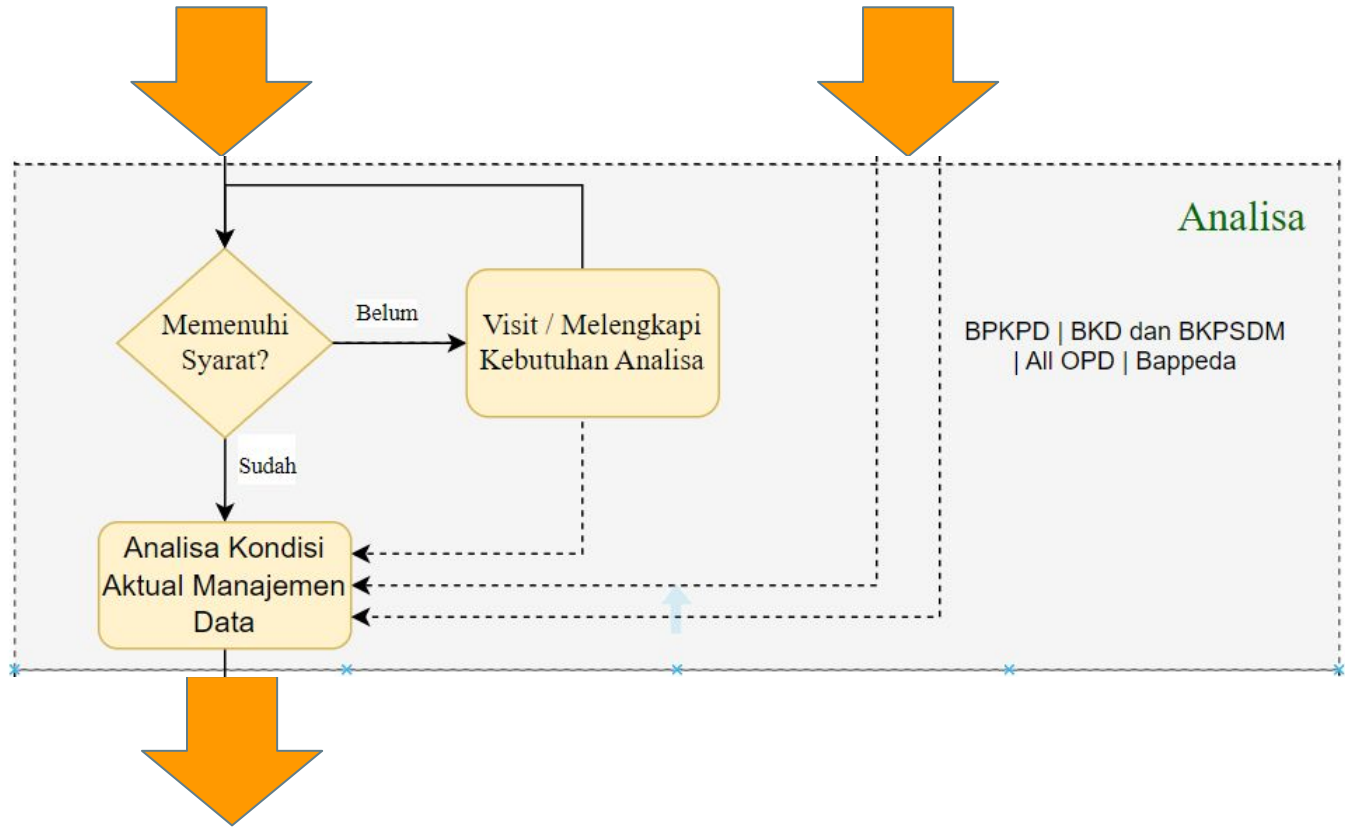
 Akan Disusun

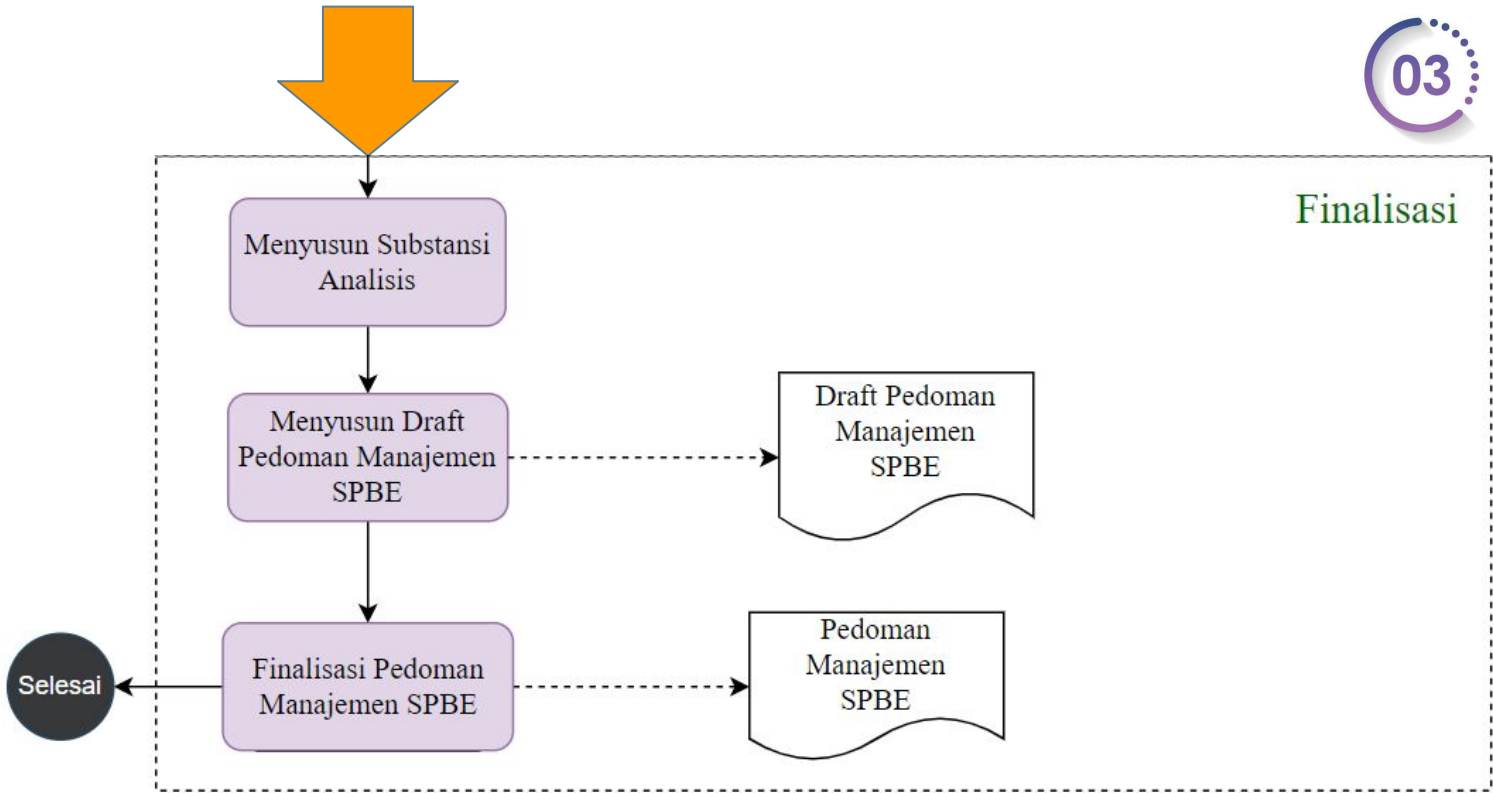


# Metodologi



# Metodologi





# Metodologi



# MANDAT MANAJEMEN SDM | REGULASI NASIONAL (Perpres 95, 2018: Pasal 51 | 1/8)

## Pembobotan

### Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

### Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

### Domain 3: Manajemen SPBE

Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Aspek 6: Audit TIK

### Domain 4: Layanan SPBE

Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



13%

13%

25%

10%

10%

5%

16,5%

12%

4,5%

45,5%

27,5%

18%

Catatan:  
Bobot domain  
merupakan agregasi  
bobot aspek yang  
ada didalamnya

**Manajemen Sumber Daya Manusia** bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

**Proses Manajemen Sumber Daya Manusia** Perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE



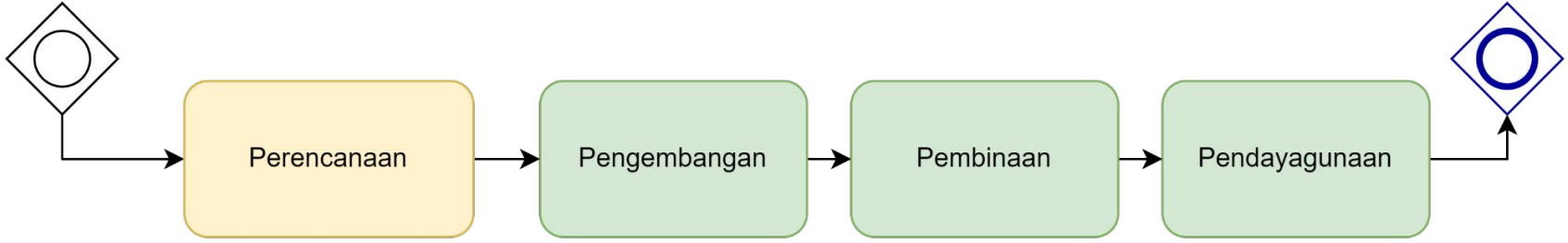
**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

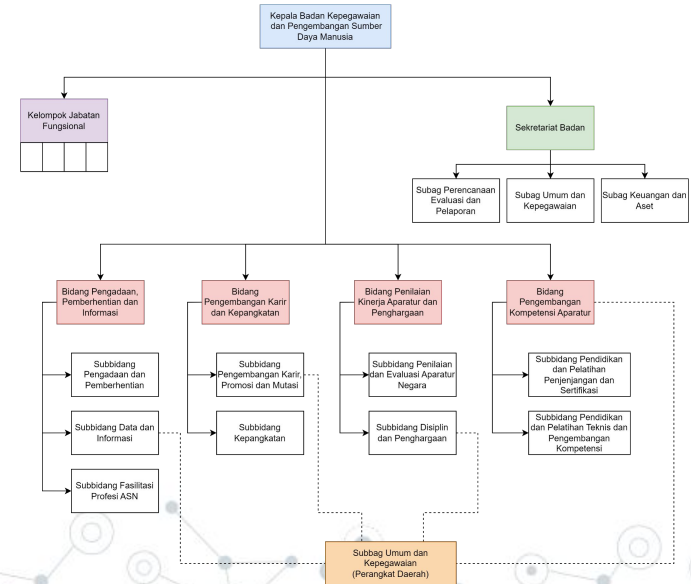
**Kolaborasi**

dilakukan bersama lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur Negara. Berpedoman pada pedoman ManSDM (Peta Ocupansi TIK ; Domain Arsitektur SPBE)

# Proses Utama Manajemen Kompetensi SDM



Rancangan kerangka kerja manajemen kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan langkah penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi pegawai dalam sebuah organisasi.



# MANDAT MANAJEMEN ASET TIK | REGULASI NASIONAL (Perpres 95, 2018: Pasal 50 | 1/8)

## Pembobotan

### Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

### Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

### Domain 3: Manajemen SPBE

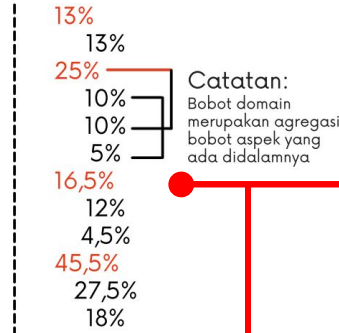
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Aspek 6: Audit TIK

### Domain 4: Layanan SPBE

Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



## Manajemen Aset TIK

bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

## Proses Manajemen Aset TIK

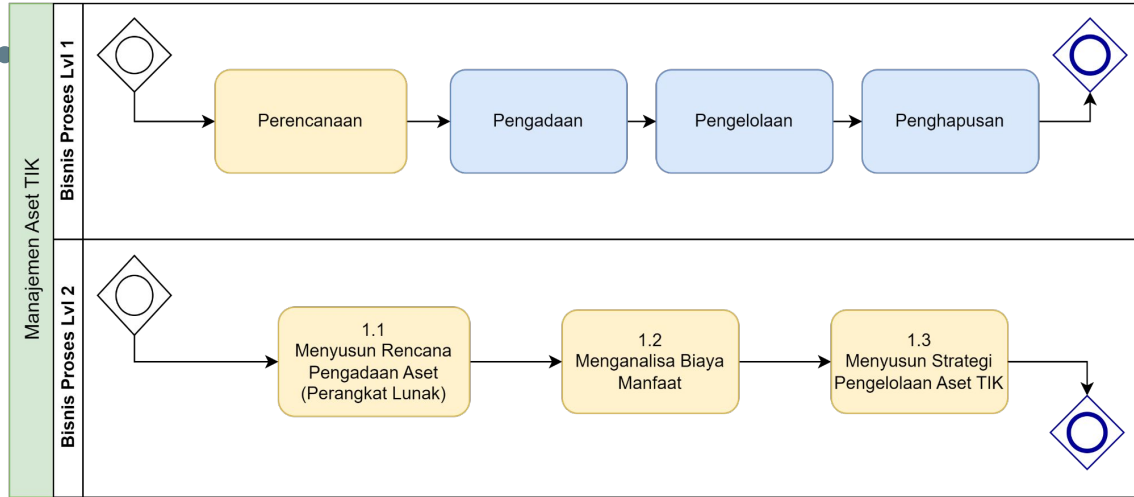
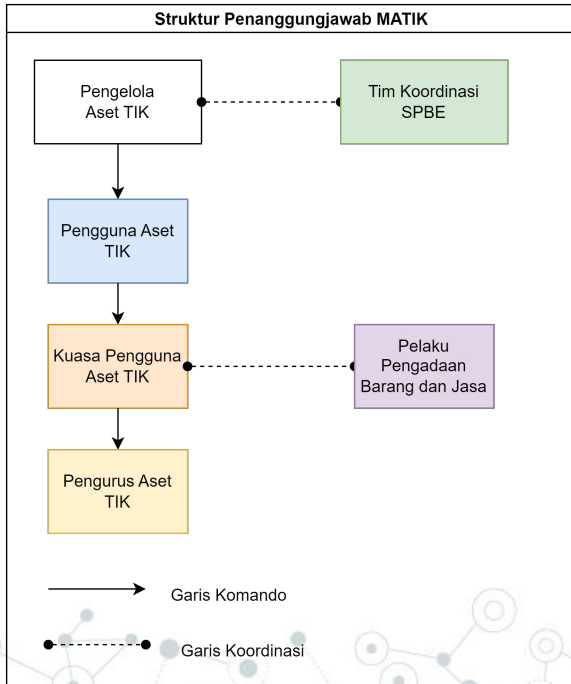
Perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di dalam SPBE.

## Kolaborasi

dilakukan bersama lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Berpedoman pada pedoman MATIK (SNI > ISO: 19770)

# Proses Utama Manajemen Aset TIK

Pelaksana





# MANDAT MANAJEMEN LAYANAN | REGULASI NASIONAL (Perpres 95, 2018: Pasal 54 | 1/8)

## Pembobotan

### Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

### Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

### Domain 3: Manajemen SPBE

Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Aspek 6: Audit TIK

### Domain 4: Layanan SPBE

Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik

13%

13%

25%

10%

10%

5%

16,5%

12%

4,5%

45,5%

27,5%

18%

Catatan:  
Bobot domain merupakan agregasi bobot aspek yang ada didalamnya



## Manajemen Layanan

bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

## Proses Manajemen Layanan

Pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

## Kolaborasi

dilakukan bersama lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika

# I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan

## 01 Perencanaan



A. Tahap Perencanaan		
Pelayanan Pengguna	Pengoperasi Layanan	Pengelolaan Aplikasi
Penentuan Target Pelayanan Pengguna	Penentuan Klasifikasi Layanan	Penentuan Target Pengelolaan Aplikasi
Perumusan Katalog Pelayanan	Pendataan Kebutuhan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Aplikasi
	Perumusan kebijakan dan pemeliharaan Infastruktur SPBE	
	Penentuan Target Pengoperasian Layanan	
	Perumusan Rencana Perubahan Layanan	

# I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan

## 02 Operasional



B. Tahap Operasional		
Pelayanan Pengguna	Pengoperasi Layanan	Pengelolaan Aplikasi
Permintaan Layanan	Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan	Pembangunan / pengembangan aplikasi
Penanganan Aduan	Pemulihan Layanan	
Reviu Berkala Gangguan Layanan	Rilis Layanan	

# I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan

03

Evaluasi



C. Tahap Evaluasi		
Pelayanan Pengguna	Pengoperasi Layanan	Pengelolaan Aplikasi
<p>Dokumen Perencanaan Pelayanan Pengguna</p>	<p>Dokumen Perencanaan Pengoperasian Layanan</p>	<p>Dokumen Perencanaan Pengelolaan Aplikasi</p>
<p>Pelaksanaan Pelayanan Pengguna (Tahapan Operasional)</p>	<p>Pelaksanaan Pengoperasian Layanan (Tahapan Operasional)</p>	<p>Pelaksanaan Pengelolaan Aplikasi (Tahapan Operasional)</p>

# MANDAT MANAJEMEN PENGETAHUAN | REGULASI NASIONAL

(Perpres 95, 2018, Psl 52)

## Pembobotan

Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

Domain 3: Manajemen SPBE

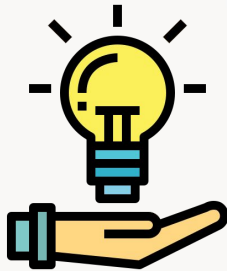
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Aspek 6: Audit TIK

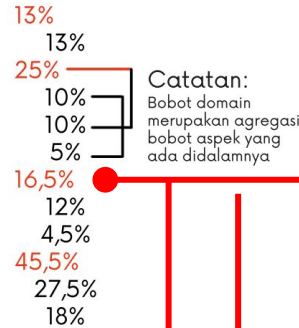
Domain 4: Layanan SPBE

Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



### Manajemen Pengetahuan

bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

### Proses Manajemen Pengetahuan

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE

### Kolaborasi

dilakukan bersama lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi (BRIN)

# PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

Perpres 95,2018: psl 52

Explicit knowledge:

- Data, information
- Documents
- Records
- Files

5%

Tacit knowledge:

- Experience
- Thinking
- Competence
- Commitment
- Deed

95%

01

## Pengumpulan

Tacit & Explicit Knowledge

02

## Pengolahan

Pengetahuan diolah menjadi sebuah Wisdom

03

## Penyimpanan

Knowledge Base Repository

05

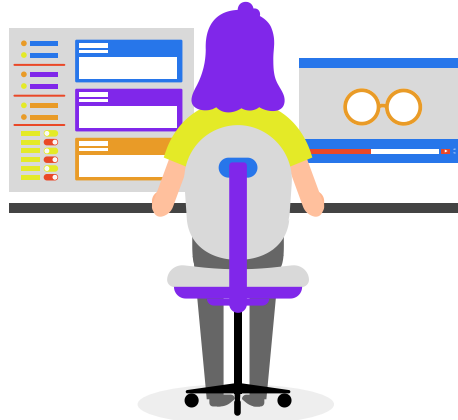
## Transfer Knowledge

proses pemindahan pengetahuan dan tata cara (*know-how*)

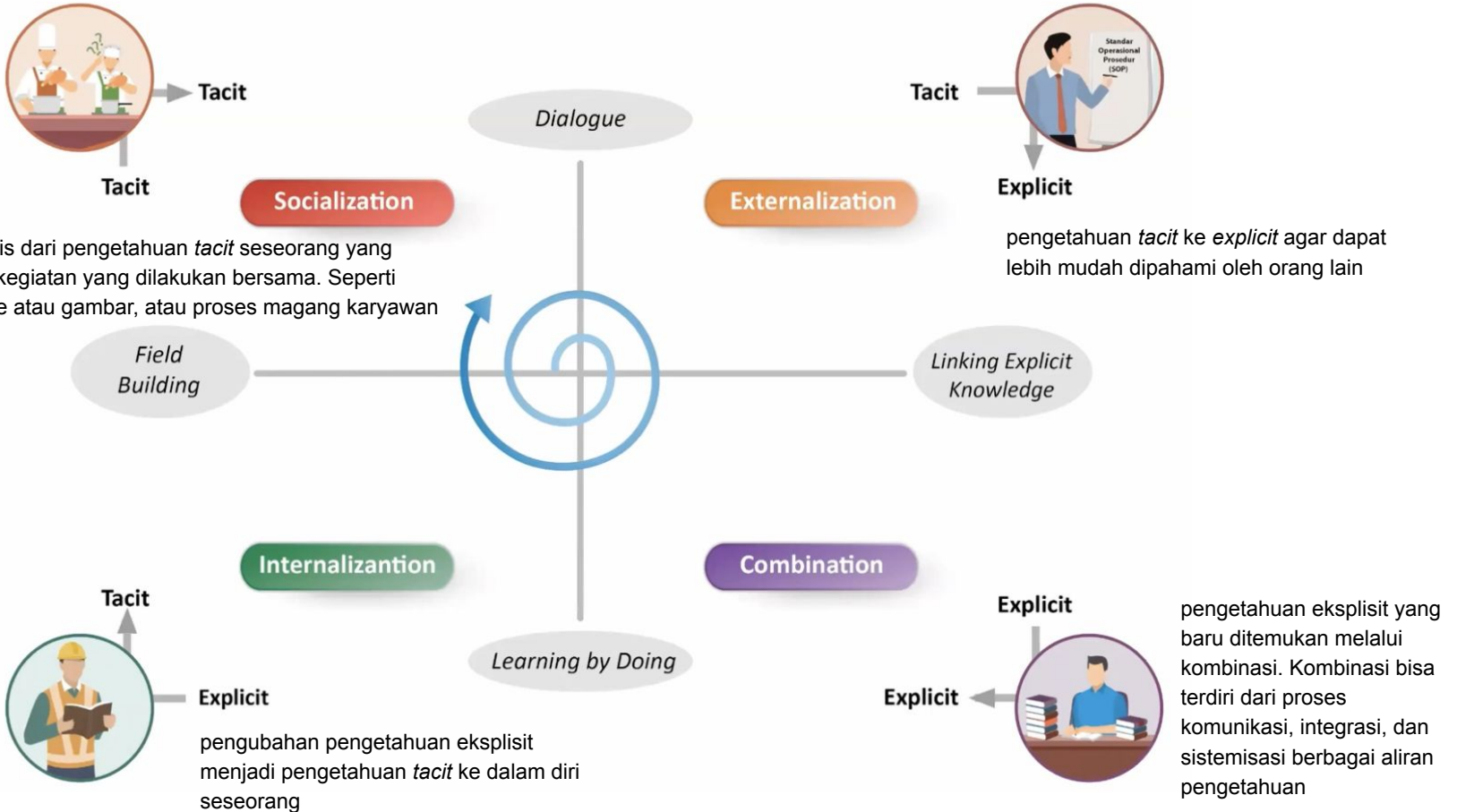
04

## Pengunaan

Pemanfaatan Pengetahuan



# Knowledge Spiral Model (SECI)



merupakan sintesis dari pengetahuan *tacit* seseorang yang biasanya melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Seperti contoh transfer ide atau gambar, atau proses magang karyawan baru.

pengetahuan *tacit* ke *explicit* agar dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain

pengetahuan eksplisit yang baru ditemukan melalui kombinasi. Kombinasi bisa terdiri dari proses komunikasi, integrasi, dan sistemisasi berbagai aliran pengetahuan

# Kerangka Acuan Kerja

## Kebutuhan Data (studi literatur)

1. Perda/Perkada Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Perda/Perkada tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD (terbaru dan lengkap + struktur organisasi)
3. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE Tahun terakhir (evaluasi dan pemantauan): 2021-2023
4. Dokumen Dukung Monev SPBE Tahun terakhir (khususnya: Domain Manajemen)
5. SOP-SOP dan Kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan manajemen ASN (BKPSDM dan BKD), Aset Daerah (BPKPD), SPM dan Pengetahuan (Bappeda)







UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY



Unduh bahan ini pada QR Code disamping  
atau akses di

<https://tinyurl.com/2024sulbar>